



LINDUNGI WARGA KOTA AKSES KESEHATAN

Pemkot Didesak Terbitkan Regulasi Teknis

YOGYA (KR) - Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait mekanisme rujukan dinilai memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pelayanan kesehatan. Pemkot Yogya pun didesak menerbitkan regulasi teknis agar warga kota dapat terlindungi.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Agung Damar Kusumandaru, menjelaskan warga sudah tidak bisa lagi langsung diperiksa di rumah sakit tipe B meski mengantongi rujukan dari puskesmas.

"Kalau mau memanfaatkan BPJS, maka harus diperiksa di rumah sakit tipe D, kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe C, baru bisa ke tipe B. Alur semacam ini sudah mulai dikeluhkan oleh masyarakat," urainya usai menggelar rapat koordinasi dengan

UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogya, Senin (8/10).

Salah satu dampaknya ialah jumlah pasien BPJS di RS Jogja yang merupakan RSUD milik Pemkot Yogya, menurun drastis. Padahal selama ini RS Jogja menjadi rujukan warga kota yang hendak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal. Selain itu, jumlah rumah sakit tipe C di Kota Yogya jumlahnya cukup terbatas sehingga justru mengalami antrean yang sangat panjang.

"Saat penjurangan aspirasi, keluhan ini sudah mulai diutarakan oleh masyarakat. RSUD di wilayah DIY ini yang tipe B hanya RS Jogja. Saya khawatir, banyak pasien yang terpaksa dirujuk ke Sleman atau Gunungkidul, kan kasihan," tandasnya.

Oleh karena itu, Agung Damar berharap agar ada regulasi teknis berupa peraturan walikota yang menutup rujukan rumah sakit tipe C dan bisa kembali mengakses tipe B. Apalagi Kota Yogya sudah menerapkan

kan Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2012. Dengan begitu, RS Jogja yang dibangun untuk melindungi kesehatan masyarakat bisa berfungsi maksimal.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Dwi Budi Utomo, mengaku sudah ada komitmen jika semua warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan akan difasilitasi biaya kepesertaan BPJS melalui APBD. Dengan catatan, warga tersebut harus secara aktif mengurus kepesertaannya ke pemerintah. "Mekanisme lebih detail memang harus dituangkan dalam peraturan walikota," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya yang juga Plt Direktur RS Jogja Agus Sudrajat, membenarkan jumlah pasien di RSUD Kota Yogya tersebut berkurang cukup drastis. Pengurangannya bisa mencapai 40 persen dibanding sebelum ada aturan baru terkait sistem rujukan BPJS. Hal ini lantaran mayoritas atau 90 persen pasien di RS Jogja merupakan peserta BPJS.

"Saat ini kami tengah menyusun berbagai strategi termasuk regulasi itu. Kami memiliki komitmen bahwa kebutuhan dasar masyarakat termasuk kesehatan, akan terlindungi atau terjamin," akunya. (Dhi)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. BPJS Kota JK	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Dinas Kesehatan	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005